



# JURNAL GEOGRAFI

JURUSAN GEOGRAFI FIS UNP

Jl. Prof. Dr. Hamka, Kampus UNP Air Tawar, Padang

Print ISSN : 2086-7042

Online ISSN : 2614-6525

## PEMETAAN KAWASAN KUMUH DAN SQUATTER AREA DI KOTA PADANG

Oleh :

**Sri Mariya, Rery Novio dan Ahyuni**

Jurusan Geografi Fakultas Ilmu Sosial Universitas Negeri Padang

Email: [rimariya\\_geo@fis.unp.ac.id](mailto:rimariya_geo@fis.unp.ac.id), [rerynovio@gmail.com](mailto:rerynovio@gmail.com), [ahyuniaziz@gmail.com](mailto:ahyuniaziz@gmail.com)

### ABSTRACT

*The increasing rate of population growth in urban areas has an impact on environmental imbalances, especially related to the expansion of residential areas. The purpose of this study was to identify slum areas and illegal / wild areas (squatter areas) based on indicators and parameters for each region. This type of research is descriptive quantitative research with population is all sub-districts in Padang City with total sampling. Slum area and squat mapping results in Padang city area are scattered in 7 villages in 5 sub-districts. Dadok Tunggul Hitam Koto Tengah Subdistrict Typology of slum areas Urban slums, Purus Padang Barat sub-district typology of downtown slums, Alai Parak Kopi District of North Padang typology of slums off the railroad tracks, Opposite of Palinggam typology of slums of Suburbs, Batang Arau slums typology River Suburb, Pasa Gadang Subdistrict of Padang Selatan typology of slum area of the Suburb, Sawahan Timur Padang Timur Subdistrict typology of slum area Railroad.*

**Keyword: urban, slum area, squatters, typology**

### ABSTRAK

Meningkatnya laju pertumbuhan penduduk di kawasan perkotaan memberikan dampak ketidakseimbangan lingkungan, terutama terkait dengan perluasan kawasan permukiman. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengidentifikasi kawasan permukiman kumuh (slum area) dan kawasan illegal/ liar (squatter area) berdasarkan indikator dan parameter untuk setiap masing-masing kawasan. Jenis penelitian ini adalah penelitian deskriptif kuantitatif dengan populasi adalah seluruh kecamatan di Kota Padang dengan pengambilan sampel secara total sampling. Hasil pemetaan slum area dan squatter area kota Padang tersebar di 7 kelurahan di 5 Kecamatan. Dadok Tunggul Hitam Kecamatan Koto Tengah Tipologi kawasan kumuh Kawasan kumuh perkotaan, Purus Kecamatan Padang Barat tipologi kawasan kumuh Pusat Kota, Alai Parak Kopi Kecamatan Padang Utara tipologi kawasan kumuh pinggiran rel kereta api, Seberang Palinggam tipologi kawasan kumuh Pinggiran Sungai, Batang Arau tipologi kawasan kumuh Pinggiran Sungai, Pasa Gadang Kecamatan Padang Selatan tipologi kawasan kumuh Pinggiran Sungai, Sawahan Timur Kecamatan Padang Timur tipologi kawasan kumuh Pinggir rel kereta api.

**Keyword: urban, slum area, squatters, typology**

## **Pendahuluan**

Pembangunan merupakan suatu usaha menuju kearah yang lebih baik, mencakup tiga aspek yaitu aspek fisik/ lingkungan, sosial dan ekonomi, dengan arti pembangunan mampu menempatkan aspek-aspek sosial, ekonomi dan lingkungan bukan hanya sebagai kerangka atau wadah tetapi bekerja saling berkaitan berkesinambungan. Menurut Nugroho dkk. (2004:3), pembangunan wilayah: (1) Pembangunan wilayah berkeinginan memberi perlindungan sosial dan ekonomi bagi keadaan-keadaan sebagai akibat dari kemiskinan dan ketimpangan. (2) Pembangunan wilayah menyediakan media bagi beroperasinya mekanisme pasar secara efisien dan memperbaiki kualitas aliran beragam sumber daya secara lestari. (3) Pembangunan wilayah dalam konteksnya sebagai suatu konsep maupun metodologi menyediakan perangkat-perangkat bagi aspek perencanaan pembangunan. (4) pembangunan wilayah merupakan upaya-upaya pembangunan sistem kelembagaan sebagai kerangka menyeluruh bagi perbaikan dan penyempurnaan pembangunan.

Pembangunan pada abad ke 21 ditandai dengan pesatnya laju pertumbuhan

penduduk baik di kawasan perkotaan maupun di kawasan pedesaan. Dampak dari peningkatan pertumbuhan penduduk adalah ketidakseimbangan lingkungan, yang berkaitan dengan adanya perluasan kawasan permukiman. Diperkirakan secara global dua pertiga jumlah penduduk dunia akan tinggal dikawasan perkotaan. Di Indonesia pada tahun 2010 tercatat persentase penduduk kota 49,8%, kemudian tahun 2015 meningkat menjadi 53,3% dan di prediksi pada tahun 2025 akan mencapai 60%, artinya kawasan perkotaan di Indonesia akan menghadapi tantangan kompleks berupa dampak dari tekanan penduduk yang meningkat ([www.kemendagri.go.id](http://www.kemendagri.go.id))

Peningkatan jumlah penduduk di perkotaan, merupakan sebagai akibat dari laju migrasi desa kota yang akan memberikan masalah baru didaerah kota. Masalah perkotaan yang serius adalah akan munculnya kawasan kumuh dan kawasan illegal. Seiring dengan pertumbuhan penduduk tersebut kebutuhan akan perumahan dan sarana prasarana di kota juga akan meningkat. Kota secara tidak langsung belum mampu meghadapi permasalahan tersebut dengan sistem perencanaan dan

pengelolaan yang tepat dalam jangka waktu yang pendek dalamantisipasi penambahan penduduk dengan berbagai motif dan keberagaman yang memicu timbulnya masalah permukiman. Perlunya pertimbangan terhadap sarana prasarana permukiman yang terjangkau dan layak huni belum sepenuhnya dapat disediakan oleh pemerintah untuk masyarakat, sehingga daya dukung prasarana dan lingkungan terhadap kawasan permukiman yang sudah ada mengalami penurunan dan memicu timbulnya kawasan kumuh (*slum area*) dan illegal (*squatter area*).

Kawasan permukiman kumuh dan ilegal dapat menjadi permasalahan serius ditinjau dari aspek keruangan, sosial, lingkungan dan estetika. Hal ini disebabkan karena budaya masyarakat yang hidup dengan sesuka hati dalam membangun rumah tanpa mempertimbangkan ruang-ruang untuk penunjang kawasan permukiman, dengan kata lain membangun seadanya tanpa mempertimbangkan etika dan estetika lingkungan.

Kota Padang merupakan ibu kota propinsi Sumatera Barat sebagai pusat pemerintahan dan tujuan mobilitas penduduk pada saat ini dipandang sebagai

suatu ruang yang penggunaan lahan berupa daerah terbangun (*built up area*), penduduk yang padat, fasilitas yang lengkap, dan berbagai macam pekerjaan. Pada tahun 2017 menurut Badan Pusat Statistik memiliki jumlah penduduk 914 968 jiwa dan diprediksi sepuluh tahun yang akan mendatang menjadi kota metropolitan. Hal ini akan menjadi daya tarik bagi masyarakat untuk tinggal di Kota Padang. Dengan pesatnya laju pertumbuhan penduduk secara tidak langsung kebutuhan akan ruang untuk bermukim akan meningkat. Bagi masyarakat yang mempunyai penghasilan menengah kebawah akan sulit untuk mendapatkan permukiman layak huni. Munculnya pembanguan permukiman yang kurang terarah, terencana dan kurang memperhatikan kelengkapan sarana dan prasarana dasar seperti ar bersih, sanitasi, sistem pengelolaan sampah, dan drainase yang digolongkan sebagai kawasan kumuh dan ilegal. Pertumbuhan permukiman kumuh (*slum* dan *squatter*) ini terasa makin pesat, kondisi ini telah menyebabkan semakin merebaklah kawasan-kawasan *slum* dan *squatter* di wilayah perkotaan.

Fenomena tersebut pada saat sekarang sudah terlihat di beberapa kawasan

di Kota Padang. Meskipun kondisi tersebut tidak dikehendaki, tapi perlunya diketahui keberadaan dalam sebuah kota. Oleh karena itu perlunya gambaran kondisi kawasan kumuh dan ilegal untuk menjadi prioritas dalam permasalahan pembangunan melalui pemetaan kawasan kumuh dan kawasan ilegal di Kota Padang.

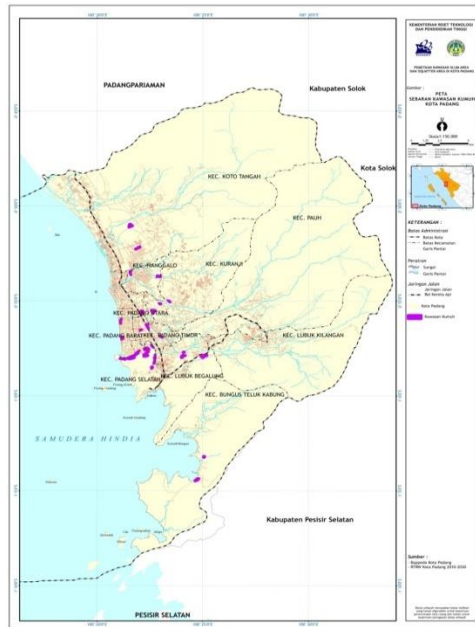
### **Metode**

Penelitian ini akan dilaksanakan di Kota Padang, dengan lokasi penelitian pada beberapa kawasan teridentifikasi kumuh dan liar/ ilegal. Penelitian dimulai dengan tahap persiapan, observasi lapangan, pengambilan data primer dan sekunder, setelah itu dilakukan analisis untuk menentukan kawasan kumuh dan liar/ ilegal di Kota Padang. Penelitian ini menggunakan metode

deskriptif kuantitatif dengan menghubungkan beberapa indikator sebagai klasifikasi penentuan kawasan kumuh dan liar/ ilegal. Populasi dari penelitian ini adalah seluruh kecamatan di Kota Padang yang teridentifikasi sebagai kawasan kumuh (*slum area*) dan kawasan liar/ ilegal (*squatter area*). sampel yang digunakan adalah *total sampling* yaitu seluruh kecamatan yang ada di Kota Padang. Analisis data yang digunakan adalah dengan melihat beberapa indikator kawasan kumuh dan ilegal/ liar.

### **Hasil dan pembahasan**

Kondisi permukiman kumuh dan squatter area yang diteliti terdapat di 5 Kecamatan (7 kelurahan) di Kota Padang. Sebaran tersebut dapat terlihat pada peta hasil penelitian sebagai berikut:



Berdasarkan hasil penelitian dan temuan dilapangan, kawasan kumuh di Kota Padang tersebut sebagai berikut:

### 1. Kecamatan Koto Tengah

Lokasi kawasan kumuh di Kecamatan Koto Tengah terdapat di Kelurahan Dadok Tunggul Hitam. Kelurahan Dadok Tunggul Hitam Kecamatan Koto Tengah memiliki luas wilayah 1178 Ha. Kelurahan Dadok Tunggul Hitam merupakan daerah yang berpotensi untuk pengembangan kawasan perdagangan, hal ini dipengaruhi oleh letak administrasinya yang berdekatan dengan kawasan pusat kota. Potensi ini mempengaruhi struktur penduduk yang dominan pedagang wiraswasta. Lokasi

kumuh pada Kawasan Dadok Tunggul Hitam antara lain RW 07 (RT 01, 02, 03, 04) dan RW 14 (RT 01, 02, 03, 04), Luas Kawasan Kumuh sekitar 42,35 Ha. Berdasarkan indikator kondisi bangunan, ketidaklayakan kondisi bangunan hunian yang merupakan kebalikan dari data kelayakan kondisi bangunan hunian akan dimasukkan dalam profil kumuh. Kondisi Aksesibilitas Kawasan Kumuh Dadok Tunggul Hitam tidak terlayani aksesibilitas lingkungan yang merupakan kebalikan dari data tingkat pelayanan kondisi aksesibilitas lingkungan akan dimasukkan dalam profil kumuh.

## 2. Kecamatan Padang Barat

Kawasan kumuh di Kecamatan Padang Barat terdapat di Kelurahan Purus. Kelurahan Purus Kecamatan Padang Barat memiliki luas wilayah 68 Ha. Kelurahan Purus terbagi menjadi 8 RW dan 23 RT, memiliki jumlah penduduk sebanyak 6.339 Jiwa yang terdiri dari 3.244 jiwa perempuan dan 3.095 jiwa laki-laki. Kelurahan Purus merupakan daerah yang berpotensi untuk pengembangan kawasan perdagangan, hal ini dipengaruhi oleh letak administrasinya yang berdekatan dengan kawasan pusat kota. Potensi ini mempengaruhi struktur penduduk yang dominan pedagang wiraswasta.

Lokasi kumuh pada Kawasan Purus antara lain RW 01 (RT 02) Luas Kawasan 7,01 Ha. Kondisi Bangunan Hunian, Indikator kondisi bangunan hunian adalah berdasarkan keteraturan bangunan, kepadatan bangunan hunian dan kelayakan fisik bangunan. Tingkat kelayakan kondisi bangunan hunian akan dimasukkan dalam identifikasi kumuh. Kondisi aksesibilitas lingkungan, tingkat pelayanan kondisi aksesibilitas lingkungan di Kawasan

Kumuh Purus kondisi kawasan yang tidak terlayani aksesibilitas lingkungan yang merupakan kebalikan dari data tingkat pelayanan kondisi aksesibilitas lingkungan akan dimasukkan dalam profil kumuh.

## 3. Kecamatan Padang Barat

Kawasan kumuh di kecamatan Padang utara terdapat Di Kelurahan Alai Parak Kopi. Kelurahan Alai Parak Kopi Kecamatan Padang Utara memiliki luas wilayah 137. Kelurahan Alai Parak Kopi terbagi menjadi 14 RW dan 53 RT, memiliki jumlah penduduk sebanyak 13.101 Jiwa yang terdiri dari 7.557 perempuan dan 7.148 laki-laki. Secara umum penduduk di Kelurahan Kelurahan Alai Parak Kopi merupakan daerah yang berpotensi untuk pengembangan kawasan perdagangan, hal ini dipengaruhi oleh letak administrasinya yang berdekatan dengan kawasan pusat kota.

Lokasi kumuh pada Kawasan Alai Parak Kopi antara lain RW 07 (RT 01, 03), RW 8 (RT 02), RW 10 (RT 03, 04), RW 11 (RT 01, 03), RW 12 (RT 01, 02, 03), dan RW 14 (RT 04). Luas Kawasan kumuh 7,60 Ha. Indikator kondisi

bangunan hunian ketidaklayakan kondisi bangunan hunian yang merupakan kebalikan dari data kelayakan kondisi bangunan hunian akan dimasukkan dalam profil kumuh. Kondisi aksesibilitas lingkungan di Kawasan Kumuh Alai Parak Kopi kondisi kawasan yang tidak terlayani aksesibilitas lingkungan yang merupakan kebalikan dari data tingkat pelayanan kondisi aksesibilitas lingkungan akan dimasukkan dalam profil kumuh

#### **4. Kecamatan Padang Selatan**

##### **a) Seberang Palinggam**

Kelurahan Seberang Palinggam Kecamatan Padang Selatan terletak di kawasan perbukitan dan memiliki luas wilayah 14 Ha. Kelurahan Seberang Palinggam terbagi menjadi 3 RW dan 14 RT, memiliki jumlah penduduk sebanyak 3.312 Jiwa yang terdiri dari 1.755 jiwa perempuan dan 1.557 jiwa laki-laki. Dengan kondisi yang terletak di kawasan pantai dan perbukitan, maka masyarakat Kelurahan Seberang Palinggam dominan memiliki pekerjaan nelayan dan wiraswasta. Secara umum

penduduk di Kelurahan Seberang Palinggam didominasi oleh pemeluk agama Islam..

Lokasi kumuh pada Kawasan Seberang Palinggam antara lain RW 1 (RT 01, 02, 03, 04, 05), RW 02(RT 02, 03.), RW 04 (RT 03, 04), dan RW 05 (RT 01, 02). Luas Kawasan Kumuh 7,23 Ha. Tingkat kelayakan kondisi bangunan hunian di Kawasan Kumuh Seberang Palinggam ketidaklayakan kondisi bangunan hunian yang merupakan kebalikan dari data kelayakan kondisi bangunan hunian akan dimasukkan dalam profil kumuh. Kondisi aksesibilitas lingkungan di Kawasan Kumuh Seberang Palinggam kondisi kawasan yang tidak terlayani aksesibilitas lingkungan yang merupakan kebalikan dari data tingkat pelayanan kondisi aksesibilitas lingkungan akan dimasukkan dalam profil kumuh

##### **b) Pasa Gadang**

Kelurahan Pasa Gadang Kecamatan Padang Selata terletak di daratan dengan ketinggian 2-78 m di atas permukaan laut dan memiliki luas wilayah 31 Ha. Kelurahan Pasa Gadang

terbagi menjadi 6 RW dan 23 RT, memiliki jumlah penduduk sebanyak 6.160 Jiwa yang terdiri dari 3.100 jiwa perempuan dan 3.060 jiwa laki-laki. Kelurahan Pasa Gadang merupakan daerah yang berpotensi untuk pengembangan kawasan perdagangan, hal ini dipengaruhi oleh letak administrasinya yang berdekatan dengan kawasan pusat kota.

Lokasi kumuh pada Kawasan Pasa Gadang antara lain RW 03 (RT 01, 03, 04), RW 05 (RT 01, 03, 04), dan RW 06 (RT 01, 02, 03). Luas Kawasan Kumuh 1,98 Ha. Tingkat kelayakan kondisi bangunan hunian di Kawasan Kumuh Pasa Gadang kondisi bangunan hunian yang merupakan kebalikan dari data kelayakan kondisi bangunan hunian akan dimasukkan dalam profil kumuh. Kondisi aksesibilitas lingkungan di Kawasan Kumuh Pasa Gadang kondisi kawasan yang tidak terlayani aksesibilitas lingkungan yang merupakan kebalikan dari data tingkat pelayanan kondisi aksesibilitas lingkungan akan dimasukkan dalam profil kumuh

c) Batang Arau

Kelurahan Batang Arau Kecamatan Padang Selatan terletak di kawasan pantai dengan ketinggian 5-10 m di atas permukaan laut dan memiliki luas wilayah 34. Kelurahan Batang Arau memiliki jumlah penduduk sebanyak 4.418 Jiwa yang terdiri dari 2.213 jiwa perempuan dan 2.205 jiwa laki-laki. Dengan kondisi yang terletak di kawasan pantai, maka masyarakat Kelurahan Batang Arau dominan memiliki pekerjaan Buruh, Nelayan.

Lokasi kumuh pada Kawasan Batang Arau antara lain RW 01 (RT 01, 04), RW 02 (RT 01, 02, 03, 04, 05, 06), RW 03 (RT 01, 02, 03, 04, 05), dan RW 04 (RT 01, 02,). Luas Kawasan Kumuh 20,65 Ha. Tingkat kelayakan kondisi bangunan hunian di Kawasan Kumuh Batang Arau ketidaklayakan kondisi bangunan hunian yang merupakan kebalikan dari data kelayakan kondisi bangunan hunian akan dimasukkan dalam profil kumuh. Kondisi aksesibilitas lingkungan di Kawasan Kumuh Batang Arau yang tidak terlayani aksesibilitas lingkungan yang merupakan kebalikan dari data tingkat pelayanan kondisi aksesibilitas



lingkungan akan dimasukkan dalam profil kumuh

## **5. Kecamatan Padang Timur**

Kelurahan Sawahan Timur merupakan salah satu teridentifikasi sebagai kawasan kumuh. Kelurahan Sawahan Timur Kecamatan Padang Timur memiliki luas wilayah 54 Ha. Kelurahan Parak Gadang Timur terbagi menjadi 5 RW dan 20 RT, memiliki jumlah penduduk sebanyak 4.710 Jiwa yang terdiri dari 2.360 jiwa perempuan dan 2.350 jiwa laki-laki. Kelurahan Sawahan Timur merupakan daerah yang berpotensi untuk pengembangan kawasan permukiman, industry dan pertanian, hal ini dipengaruhi oleh letak administrasinya yakni bagian timur dari Kota Padang yang memiliki luasan lahan masih banyak untuk pengembangan permukiman dan hal lain yang mendukung Kelurahan Sawahan Timur dekat dengan sarana pendidikan.

Lokasi kumuh pada Kawasan Sawahan Timur antara lain RW 04 (RT 04) dan RW 05 (RT 01, 02, 03, 04, 05, 06). Luas Kawasan Kumuh 4.30 Ha. Kondisi bangunan hunian yang merupakan

kebalikan dari data kelayakan kondisi bangunan hunian akan dimasukkan dalam profil kumuh. Kondisi aksesibilitas lingkungan di Kawasan Kumuh Sawahan Timur kawasan yang tidak terlayani aksesibilitas lingkungan yang merupakan kebalikan dari data tingkat pelayanan kondisi aksesibilitas lingkungan akan dimasukkan dalam profil kumuh.

## **Kesimpulan**

Berdasarkan hasil penelitian dan hasil pemetaan slum area dan squater area Kota Padang tersebar di 5 Kecamatan dan 7 kelurahan.

1. Lokasi kumuh pada Kawasan Dadok Tunggul Hitam antara lain RW 07 (RT 01, 02, 03, 04) dan RW 14 (RT 01, 02, 03, 04), dengan Luas Kawasan Kumuh 42,35 Ha. Tipologi kawasan kumuh Dadok Tunggul Hitam sendiri yaitu Kawasan kumuh Perkotaan. Letak bangunan dan kavling teratur, kondisi bangunan temporer dan Semi permanen yang tidak terawat.
2. Lokasi kumuh pada Kawasan Purus antara lain RW 01 (RT 02) Luas

Kawasan 7,01 Ha. Kawasan kumuh Purus berdasarkan analisa kondisi dan bentuk bangunan termasuk ke dalam tipologi Kawasan kumuh Pusat Kota, yang membutuhkan penanganan prioritas. Bangunan dan Kavling tidak teratur, kondisi bangunan yang ada di kawasan ini; temporer (menjorok ke sungai), semi permanen dan permanen dengan kondisi yang tidak terawat.

3. Lokasi kumuh pada Kawasan Alai Parak Kopi antara lain RW 07 (RT 01, 03), RW 8 (RT 02), RW 10 (RT 03, 04), RW 11 (RT 01, 03), RW 12 (RT 01, 02, 03), dan RW 14 (RT 04). Luas Kawasan kumuh 7,60 Ha. Kawasan kumuh Alai Parak Kopi berdasarkan analisa kondisi dan bentuk bangunan termasuk ke dalam tipologi Kawasan kumuh Pinggiran Rel Kereta Api, pada prinsipnya semua bangunan yang terdapat dalam sempadan rel kereta api dikategorikan bangunan ilegal (squater area), dan harus segera ditertibkan karena mengganggu kenyamanan.
4. Lokasi kumuh pada Kawasan Seberang Palinggam antara lain RW 1 (RT 01, 02, 03, 04, 05), RW 02 (RT 02, 03, 04), dan RW 04 (RT 03, 04), dan RW

05 (RT 01, 02). Luas Kawasan Kumuh 7,23 Ha. Kawasan kumuh Seberang Palinggam berdasarkan analisa kondisi dan bentuk bangunan termasuk ke dalam tipologi Kawasan kumuh Pinggiran Sungai, kawasan kumuh di area ini sebagian terdapat bangunan ilegal yang terletak di daerah rawan bencana longsor, tata letak bangunan dan kavling tidak teratur.

5. Lokasi kumuh pada Kawasan Pasa Gadang antara lain RW 03 (RT 01, 03, 04), RW 05 (RT 01, 03, 04), dan RW 06 (RT 01, 02, 03). Luas Kawasan Kumuh 1,98 Ha. Kawasan kumuh Pasa Gadang berdasarkan analisa kondisi dan bentuk bangunan termasuk ke dalam tipologi Kawasan kumuh Pinggiran Sungai, tata letak bangunan dan kavling tidak teratur, kepadatan bangunan sangat tinggi.
6. Lokasi kumuh pada Kawasan Batang Arau yaitu RW 01 (RT 01, 04), RW 02 (RT 01, 02, 03, 04, 05, 06), RW 03 (RT 01, 02, 03, 04, 05), dan RW 04 (RT 01, 02, 03, 04, 05). Luas Kawasan Kumuh 20,65 Ha. Kawasan kumuh Batang Arau berdasarkan analisa kondisi dan bentuk bangunan termasuk ke dalam

tipologi Kawasan kumuh Pinggiran Sungai, area ini terdapat bangunan ilegal yang terletak di daerah rawan bencana longsor, tata letak bangunan dan kavling tidak teratur.

7. Lokasi kumuh pada Kawasan Sawahan Timur antara lain RW 04 (RT 04) dan RW 05 (RT 01, 02, 03, 04, 05, 06). Luas Kawasan Kumuh 4.30 Ha. Kawasan kumuh Sawahan Timur

berdasarkan analisa kondisi dan bentuk bangunan termasuk ke dalam tipologi Kawasan kumuh Pinggir Rel Kereta Api, bangunan yang terdapat di sepanjang sempadan rel kereta api masuk dalam kategori ilegal (*Squater Area*). Tata letak bangunan yang tidak teratur dan tidak terawat.

## Daftar Rujukan

- Anharudin. 2005. Kebijakan dan rogram Resettlement Transmigrasi Bagi Penduduk Bermasalah di Indonesia. Mjalah Balifto, (online) Volume 2 Nomor 4-2—4 (<http://.nakertrans.go.id/newsdetail.php?id=204>)
- Asep, Harianto. 2006. *Strategi penanganan kawasan kumuh sebagai upaya menciptakan lingkungan perumahan Dan permukiman yang sehat* (Contoh Kasus : Kota Pangkalpinang). Jurnal PWK Unisba
- Nugroho, Iwan dan Rochmin Dahuri. 2004. *Pembangunan Wilayah: Perspektif Ekonomi, Sosial, dan Lingkungan*. Jakarta: LP3S. ([www.kemedagri.go.id](http://www.kemedagri.go.id))
- BIntarto, R. 1983 *Interaksi Desa Kota dan Permasalahannya*. Gralia Indonesia. Yogyakarta.
- Jayadi, T. Johara (199)b *Tata Guna Tanah dalam Perencanaan Pedesaan Perkotaan dan Wilayah*. ITB
- Yunus, Hadi Sabari. 2000. *Struktur Tata Ruang Kota*. UGM; Yogyakarta
- Undang – Undang Nomor Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2011 tentang Perumahan dan Kawasan Permukiman
- Clinard, Marshall B. (1996) *slums and Community Development*. USA-Collier. Macmilan \_Canada
- Srinivas, H. 2007. *Defining Squatter Settlement, Urban Squatter and Slum*, (<http://www.gdrc.org/uem/squatters/define-squatter.html-19k>)